

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pikir penelitian. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian selanjutnya.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

| Nama | Judul Penelitian | Jenis Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----------------------------|--|---|---|
| 1. Mahardika Perdana (2010) | Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Brawijaya Malang | Termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus | Berdasarkan hasil penelitian Mahardika bahwa sistem pengendalian intern terkait penerimaan dan pengeluaran kas telah berlangsung secara efektif. Efektifitas tersebut dibuktikan dengan tiga indikator yaitu, struktur organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan, dan penerapan praktik yang sehat. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan pada sistem pengendalian intern terkait penerimaan dan pengeluaran kas ini. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>2. Ignasius Deloyola Lima (2010)</p> | <p>Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada Perusahaan Percetakan (Studi Kasus CV. Citra Mentari)</p> | <p>Berbentuk kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Data yang digunakan bersifat primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis ini juga menggunakan teknik perpanjangan pengamatan dan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data.</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian Ignasius bahwa sistem akuntansi penerimaan kas serta unsur pengendalian intern yang terdapat dalam CV. Citra Mentari masih belum baik hal ini terlihat dari tidak adanya catatan akuntansi, fungsi yang terkait masih dilakukan oleh satu fungsi saja, kurang lengkapnya dokumentasi yang dibutuhkan, dan prosedur akuntansi penerimaan kas tidak memperhatikan unsure pengendaliannya sehingga akuntabilitas dari setiap laporan masih lemah serta sangat rentan dari tindak kecurangan.</p> |
| <p>3. Ruzanna Amania (2011)</p> | <p>Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses</p> | <p>Teknik pengujian menggunakan metode fixed sample size. Penentuan</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian Ruzanna menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian</p> |

| | | | |
|------------------------|--|---|---|
| | Pemberian Kredit Mikro (Studi pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) tbk Cabang Majapahit Semarang) | jumlah sampel yang dipilih menggunakan bantuan table angka random, menetapkan tingkat keandalan (reliability level) 95% dan batas ketepatan tertinggi yang diharapkan (Desired upper Precission Limit / AUPL) 5%. | intern, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan. Mikro Kredit Analis (MKA) pada Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang kurang memadai dibanding tingginya aplikasi permohonan kredit yang masuk sehingga dikhawatirkan terjadi kerugian akibat dari kualitas kredit yang lemah. Selain itu, pelaksanaan kunjungan atau on the spot yang dilakukan, tidak sesuai dengan tata cara dalam Manual Produk Kredit Mikro. |
| 4. Vita Puspita (2011) | Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. KIA Mobil Indonesia Cabang Surabaya | Metode pengumpulan data dengan melakukan interview, pemanfaatan data, dan kuesioner. | Berdasarkan hasil penelitian Vita bahwa sistem pengendalian intern pengeluaran kas dengan kas kecil dan cek di PT. KIA MOBIL INDONESIA cabang Surabaya sudah cukup baik, namun masih ada unsur pengendalian intern perusahaan yang belum terpenuhi. |

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi

A. Pengertian Sistem

Menurut Mulyadi (2010:5) Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan menurut W. Gerald Cole dalam Baridwan (1985:1) Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

B. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2010:3) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi adalah formulir,

catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan.

C. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut George dan William (2006:8) Sistem Informasi Akuntansi adalah berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi.

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan alat koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang berstruktur pula..

Menurut Mulyadi (1993:19), sistem informasi akuntansi memiliki empat tujuan dalam penyusunannya, yaitu:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Dari tujuan sistem informasi akuntansi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data transaksi keuangan dan non keuangan menjadi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya.

D. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi

Dalam Baridwan (1985:5) sistem akuntansi terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, atau dapat juga dikatakan terdiri dari prosedur-prosedur yang berhubungan. Menurut Mulyadi (2010:3) Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikooordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Berdasarkan bukti transaksi yang ada dalam rumah sakit, dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas sudah cukup lengkap. Hal ini terbukti dengan adanya bukti transaksi pengeluaran kas, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan. Berikut lima unsur sistem akuntansi, diantaranya yaitu:

a. Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas selembar kertas. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan.

b. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasan (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian di posting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar.

c. Buku Besar

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.

d. Buku Pembantu

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu disebut sebagai

catatan akuntansi akhir karena setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan.

e. Laporan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa Neraca, Laporan L/R, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk Laporan yang dihasilkan RSUD biasanya berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berupa laporan Neraca, laporan Surplus/Defisit atau laporan Kinerja Keuangan RSUD, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan laporan yang dihasilkan untuk RSUD yang telah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.2.2 Sistem Pengendalian Intern

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. Menurut James Hall (2009) dalam *Committee on Auditing Procedure American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*

mengemukakan, bahwa pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Hartanto (1997) dalam Mardi (2011:59) menjelaskan pengendalian internal dalam arti sempit dan luas. Pengendalian internal dalam arti sempit disamakan dengan internal check yang merupakan mekanisme pemeriksaan ketelitian data administrasi. Sedangkan dalam arti luas, pengendalian internal disamakan dengan management control yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan COSO (*Comitte of Sponsoring Organization*) dalam Romney dan Steinbart (2006:230), pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku

B. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Dalam (Widjaja, 1995:2) tujuan sistem pengendalian internal yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi: Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan. Berbagai macam data digunakan untuk mengambil keputusan yang penting. Sistem pengendalian akuntansi intern bertujuan untuk mengamankan/menguji kecermatan dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya dengan jalan mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan pada saat yang tepat.
2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya: Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak disengaja. Sistem pengendalian intern dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.
3. Untuk menggalakkan efisiensi usaha: Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber dana yang tidak efisien.

4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan: Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian intern memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan.

Sedangkan dalam (Mardi, 2011: 59) tujuan pengendalian internal, yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan

C. Ciri-ciri Pokok Sistem Pengendalian Intern

Menurut Baridwan (1993) dalam Vita (2010: 21) ciri-ciri pokok sistem pengendalian intern adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.
2. Suatu wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta, utang-utang, pendapatan-pendapatan, biaya-biaya.
3. Praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi di setiap bagian dalam organisasi.
4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggungjawabnya.

Selain itu, ada juga pengendalian internal yang lebih fokus pada IT oleh *Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)*. Dalam penelitian Curtis dan Frederrick (2000: 70,3) menjelaskan bahwa COBIT menyediakan pengendalian IT. Konsep pengendalian diadaptasi dari laporan COSO dan didefinisikan sebagai "kebijakan, prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan bisnis akan tercapai dan kejadian yang tidak diinginkan akan dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi". Hal ini membuat "pengendalian" COBIT yang setara dengan "pengendalian internal" COSO ini. Namun, tujuan pengendalian di bawah COBIT didefinisikan dengan cara proses berorientasi yang mengikuti prinsip bisnis rekayasa ulang. Pengendalian jenis ini dilaksanakan pada tingkat domain dan proses. Konsep "Pengendalian IT" ini diadaptasi dari Laporan SAC dan didefinisikan sebagai "sebuah pernyataan dari hasil yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan prosedur pengendalian dalam kegiatan IT tertentu." Kontrol ini dilaksanakan pada tingkat aktivitas TI.

Domain COBIT IT terdiri dari empat bagian: perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi, pengiriman dan dukungan, dan pemantauan. Proses TI, 34 dalam semua, yang diidentifikasi dalam masing-masing empat domain. Akibatnya, kegiatan dalam proses juga diidentifikasi - kegiatan untuk proses operasional entitas dan kegiatan. Tujuan IT pada dasarnya untuk memfasilitasi pemenuhan tujuan bisnis. Tujuan bisnis yang dirujuk sebagai "kebutuhan bisnis untuk informasi" dan meliputi:

1. Kualitas persyaratan (kualitas, biaya, dan pengiriman)
2. Fidusia persyaratan, sebagaimana didefinisikan oleh COSO (efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan informasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan)
3. Persyaratan keamanan (kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan).

Dengan demikian, tujuan pengendalian COBIT ini melampaui tujuan bisnis yang didefinisikan oleh COSO atau SAS No 55 dan 78.

2.2.3 Komponen Pengendalian Internal oleh COSO

A. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri faktor-faktor berikut ini:

1. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika

Merupakan hal yang penting bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasional yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi, dengan cara secara aktif mengajarkan dan mempraktikannya. Pihak manajemen harus mengembangkan kebijakan yang tertulis dengan jelas, yang secara eksplisit mendiskripsikan perilaku yang jujur dan tidak jujur. Seluruh tindakan yang tidak jujur harus secara menyeluruh diinvestigasi, dan mereka yang dianggap bersalah harus dibebastugaskan. Pegawai yang tidak jujur harus dituntut untuk

membat pegawai mengetahui bahwa perilaku semacam ini tidak akan diperbolehkan.

2. Filosofi pihak manajemen dan gaya operasi

Semakin bertanggung jawab filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi mereka, semakin besar kemungkinannya para pegawai akan berperilaku secara bertanggung jawab dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila pihak manajemen menunjukkan sedikit perhatian atas pengendalian internal, maka para pegawai akan menjadi kurang rajin dan efektif dalam mencapai tujuan pengendalian tertentu.

3. Komitmen terhadap kompetensi

Untuk mencapai tujuan entitas, personel di setiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi. Dalam lingkungan bisnis global, produk dan jasa bersaing untuk merebut kepuasan customers melalui kandungan pengetahuan yang berada dalam produk jasa tersebut. Oleh karena itu, komitmen manajemen terhadap kompetensi akan mengakibatkan produk dan jasa yang

dihasilkan bagi kepentingan customers berisi kandungan pengetahuan (knowledge content) memadai untuk memenuhi kebutuhan customers.

4. Dewan komisaris dan komite audit

Menurut Mardi (2011:63) Komite audit bertanggung jawab mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangannya, dan kepatuhannya terhadap peraturan serta standar yang terkait. Komite berhubungan secara dekat dengan auditor eksternal dan internal perusahaan. Peninjauan ini berfungsi untuk memeriksa integritas manajemen guna meningkatkan kepercayaan publik yang berinvestasi atas kesesuaian pelaporan keuangan.

5. Struktur organisasi

Menurut Mardi (2011:63) Struktur yang jelas dan tegas menunjukkan batas wewenang seseorang melalui garis komando dan menetapkan garis otoritas serta tanggung jawab, termasuk sentralisasi atau desentralisasi otoritas, penetapan tanggung jawab untuk tugas tertentu, pembagian wewenang terhadap tanggung jawab seseorang memengaruhi informasi manajemen.

6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Menurut Mulyadi (2002:187) Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber

daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Pengendalian intern yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur. Karena pentingnya perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur agar tercipta lingkungan pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka.

B. Aktivitas Pengendalian

Menurut Mulyadi (2002:189) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.

Menurut Mardi (2011: 63) Aktivitas pengendalian pada dasarnya berbentuk pengendalian yang menggunakan pendekatan

berbasis teknologi informasi dan pengendalian yang menggunakan pendekatan manual. Pengendalian berdasarkan teknologi informasi secara khusus berkaitan dengan lingkungan teknologi dari pengendalian umum dan aplikasi. Pengendalian umum meliputi kegiatan yang berhubungan dengan audit teknologi informasi yang ditujukan melindungi lingkungannya agar dikelola secara baik, sehingga proses pengendalian mendapatkan dukungan lebih efektif. Berkaitan dengan pengendalian aplikasi lebih ditujukan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan pada pengolahan data sistem komputer.

Pengendalian fisik berkaitan dengan sistem konvensional yang melakukan aplikasi prosedur manual. Namun, konsep pengendalian ini tetap memperhatikan dampak pengendalian yang berhubungan dengan lingkungan teknologi informasi, pengendalian fisik dalam perusahaan terdiri dari beberapa unsur berikut:

1. Kewenangan penanganan transaksi
2. Spesialisasi tanggung jawab
3. Format dan penggunaan dokumen pekerjaan
4. Pengamanan harta kekayaan perusahaan
5. Independensi pemeriksaan

C. Penilaian Risiko

Menurut Mulyadi (2002:188) Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Sedangkan menurut Mardi (2011:64) Dampak dari perencanaan strategis dan operasional serta keuangan dan informasi akan menimbulkan risiko bisnis, beberapa kebijakan bias berakibat yang lebih besar serta kemungkinan muncul lebih besar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan biaya dan manfaat pengendalian harus direncanakan dan diperhitungkan secara cermat sehingga kegagalan dan risiko dapat diminimalisir dampaknya.

D. Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas. Focus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem

akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

1. Sah.
2. Telah diotorisasi.
3. Telah dicatat.
4. Telah dinilai secara wajar.
5. Telah digolongkan secara wajar.
6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya.
7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

E. Pemantauan

Menurut Mulyadi (2002:195) Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian

pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

Menurut Mardi (2011:65) Pengawasan yang efektif dilakukan untuk meningkatkan kinerja bukan untuk menghilangkan kinerja dan prestasi perusahaan. Di beberapa perusahaan, hal ini kurang mendapat perhatian. Pengawasan yang dilakukan, antara lain supervise yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban, dan audit internal.

Dari lima komponen pengendalian internal oleh COSO diatas, dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal sangat diperlukan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada. Dalam rumah sakit ini lima komponen tersebut sudah diterapkan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi, antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian

- a. Adanya struktur organisasi dan pemisahan tugas
- b. Adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing karyawan
- c. Memiliki kebijakan-kebijakan akuntansi pengeluaran kas
- d. Adanya penganggaran sehingga dapat merencanakan apa yang menjadi kebutuhan rumah sakit

2. Penilaian Risiko

- a. Adanya perencanaan anggaran untuk dapat meminimalisir risiko
 - b. Adanya pengotorisasian dan persetujuan pihak yang berwenang atas transaksi yang dilakukan
3. Aktivitas Pengendalian
- a. Telah dibuatnya dokumen tersendiri dalam setiap pekerjaan
 - b. Dilakukannya pengecekan transaksi setiap bulannya
 - c. Adanya pemisahan tugas yang sesuai
4. Informasi dan Komunikasi
- a. Semua transaksi yang terjadi telah dicatat serta digolongkan sesuai dengan bukti yang ada dan waktu terjadinya transaksi
 - b. Bagian akuntansi setiap bulan selalu membuat laporan keuangan untuk mengetahui semua aktivitas yang terjadi di bagian keuangan
 - c. Kepala bagian keuangan melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan
5. Pemantauan
- a. Adanya pengawasan terhadap kinerja karyawan untuk meningkatkan kinerja
 - b. Kepala bagian keuangan melakukan pengawasan terhadap ketaatan karyawan terhadap prosedur yang telah dibuat

Dalam penelitian Sulaiman (2007: 112-114) menyatakan hasil penelitiannya bahwa pengendalian internal pada pengeluaran dana terbagi menjadi tiga pengendalian kegiatan yaitu otorisasi, pembagian tugas, dan bukti fisik dari dana. Namun, dokumen yang digunakan untuk mendukung

penyaluran dana bervariasi dari satu masjid ke masjid lain dan tergantung pada jenis pembayarannya. Hasilnya, sampai batas tertentu menunjukkan bahwa masjid Negara di Malaysia memang memiliki sistem pengendalian internal yang tepat untuk mengamankan asset mereka (dana). Temuan memberikan beberapa indikasi pada keamanan sumbangan publik (sadaqqah) dari Masjid Negara di Malaysia Barat. Adanya pengendalian internal yang memadai di masjid-masjid Negara menunjukkan bahwa komite manajemen dari Masjid Negara menganggap tugas mereka untuk menjaga uang publik dapat dipercayakan kepada mereka. Adanya pengendalian tersebut juga memberikan jaminan bahwa uang publik digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan benar. Fakta ini dibuktikan dengan kinerja yang memuaskan dari satu Masjid Negara (yang berkaitan dengan pengendalian internal pada pencairan dana). Fakta ini adalah pengecualian daripada norma yang memberikan beberapa jaminan kepada pemerintah bahwa dana yang dialokasikan untuk masjid Negara memang dikontrol dengan baik.

Penelitian ini cukup menarik karena penelitian Sulaiman pada masjid menyediakan beberapa dukungan bahwa tidak ada pembagian antara agama dan profane dalam islam. Yang relevan dari penelitian ini yaitu konsep islam, akuntabilitas. Sementara individu bertanggungjawab kepada Allah, ia juga bertanggung jawab kepada orang lain karena hubungannya dengan orang lain mencerminkan hubungannya dengan Allah.

2.2.4 Unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mardi (2011:60) agar suatu sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan secara efektif seperti yang diharapkan, harus memiliki unsur pokok yang dapat mendukung prosesnya. Adapun unsur pokok sistem pengendalian internal adalah:

1. Struktur Organisasi; merupakan suatu kerangka pemisahan tanggung jawab secara tegas berdasarkan fungsi dan tingkatan unit yang dibentuk. Prinsip dalam menyusun struktur organisasi, yaitu pemisahan antara setiap fungsi yang ada dan suatu fungsi jangan diberi tanggung jawab penuh melaksanakan semua tahapan kegiatan, hal ini bertujuan supaya tercipta mekanisme saling mengendalikan antar fungsi secara maksimal.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi. Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Uraian tugas harus didukung petunjuk prosedur berbentuk peraturan pelaksanaan tugas disertai penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang mengesahkan kegiatan, kemudian berhubungan dengan pencatatan harus disertai pula prosedur yang baku. Prosedur pencatatan yang baik menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan. Transaksi terjadi apabila telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan setiap dokumen memiliki bukti yang sah, ada paraf dan tanda tangan pejabat yang memberi otorisasi.

3. Pelaksanaan kerja secara sehat. Tata kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara. Unsur kehati-hatian (prudent) penting dijaga agar tidak seorang pun menangani transaksi di awal sampai akhir sendirian, harus rolling antar pegawai, melaksanakan berbagai tugas yang telah diberikan, memeriksa kekurangan dalam pelaksanaan, serta menghindari kecurangan.
4. Pegawai berkualitas. Salah satu unsur pokok penggerak organisasi ialah karyawan, karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Tidak hanya berkualitas, tetapi kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan. Pegawai yang berkualitas dapat ditentukan berdasarkan proses rekrutmen yang dilakukan kepada mereka, apakah berbasis professional atau berdasarkan carity (kedekatan teman).

2.2.5 Keterbatasan Pengendalian Intern Suatu Entitas

Menurut Mulyadi (2002:181) Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern:

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.
2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.
3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.
5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus

memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

Dalam penelitian Reager (2005:1) mengatakan Pengelolaan dan pengendalian kas begitu penting bagi kepatuhan karena kas merupakan aset yang sangat likuid dan berharga. Menyiapkan lingkungan pengendalian yang baik untuk melindungi uang tunai tidak selalu membutuhkan beberapa tingkat pengendalian membuat proses pengecekan ganda atau triple. Namun, tidak jarang untuk menemukan bahwa beberapa pemeriksaan sudah sering di tempat. Jika proses kendali tunggal bekerja, tidak perlu untuk memiliki proses backup, terutama jika setiap transaksi atau item aset tidak material.

Konsep pengendalian internal yang baik didasarkan pada gagasan pengecekan dan keseimbangan serta pemisahan tugas. Perusahaan besar dengan beberapa bagian staf umumnya akan dapat menyelesaikan tugas ini lebih mudah daripada perusahaan-perusahaan kecil dengan staf yang terbatas. Perusahaan kecil cenderung lebih mengandalkan sistem teknologi informasi (TI) dan manajemen meningkat atau pengawasan auditor internal.

Menurut Mustafa dalam penelitiannya pada Bank Yordania mengatakan bahwa mengkonfirmasi merupakan bagian penting dari suatu Sistem Informasi Akuntansi dalam peningkatan efektivitas dan kemampuan pengendalian internal di bank Yordania dalam hal memenuhi kebutuhan stakeholder baik dari dalam dan luar. Menyadari betapa pentingnya SIA, bank Yordania menyediakan pengendalian departemen mereka untuk bekerja efektif. Dari titik ini, bank Yordania harus meng-upgrade sistem pengendalian

mereka agar kompatibel dengan orientasi internasional, khususnya seperti yang disarankan oleh Komite Organisasi Sosial (COSO).

Bastian (2006:31) menyatakan bahwa Penyusunan sistem akuntansi untuk suatu organisasi perlu mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.
3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Dengan kata lain, penyelenggaraan sistem akuntansi perlu mempertimbangkan biaya versus manfaat (*cost versus benefit*) dalam menghasilkan suatu informasi.

Dari beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan sistem dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan sistem yang baik harus dipikirkan matang – matang terlebih dahulu agar biaya yang dikeluarkan,

informasi yang dihasilkan, dan pengendaliannya akurat serta efisien. Karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Setiap organisasi memiliki struktur organisasi serta kebijakan akuntansi. Struktur organisasi yang baik dalam Bastian (2006:32) yaitu dapat menunjukkan pembagian tugas untuk masing-masing bagian dalam organisasi. Tugas masing-masing bagian secara lengkap dapat dilihat dari deskripsi pekerjaan (*job description*) yang merupakan lampiran dalam struktur organisasi. Khusus untuk bagian akuntansi, jumlah pegawai di masing-masing bagian dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan beban pekerjaan masing-masing bagian.

Kebijakan akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009:1.3) adalah “Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan”. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK. Jika belum diatur dalam PSAK, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan.

2.2.6 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta

Dalam Bastian (2006:75) Secara konseptual, perbedaan kedua tipe organisasi ini terletak pada tujuan yang akan dicapai. Di tahap perencanaan, organisasi sektor swasta menitikberatkan pada keuntungan usaha semaksimal

mungkin. Sementara, organisasi sektor publik lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas, perbedaan praktik akuntansi sektor publik dan sektor swasta disajikan pada tabel 2.2:

Tabel 2.2 Perbedaan Akuntansi sektor Publik dengan Sektor Swasta

| Perbedaan | Akuntansi Sektor Publik | Akuntansi Sektor Swasta |
|------------|--------------------------------|-------------------------|
| Tujuan | Kesejahteraan masyarakat | Keuntungan |
| Organisasi | Sektor Publik | Swasta |
| Keuangan | Negara, Daerah, dan Masyarakat | Individual |

Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Indra Bastian)

Bentuk dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu Negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran Negara. Keempat faktor ini sangat mempengaruhi karakteristik akuntansi sektor publik. Akibatnya laporan sektor publik dapat dibedakan dibandingkan laporan keuangan swasta.

Menurut Henley dkk dalam Bastian (2006:76), ada beberapa perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan laporan keuangan sektor swasta: *pertama*, laporan unit pemerintah sangat dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik; *kedua*, laporan keuangan sektor swasta sangat terikat dengan aturan dan kriteria keuangan; *ketiga*, pertanggungjawaban laporan unit pemerintah ke DPR/D dan masyarakat luas; *keempat*, kriteria pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditentukan oleh para pemegang saham dan kreditor; *kelima*, laporan unit pemerintah seharusnya dikembangkan sebagai pengembangan akuntabilitas publik; *keenam*, laporan

keuangan sektor swasta hanya diungkap di tingkat organisasi secara keseluruhan; *ketujuh*, laporan unit pemerintahan dan pemerintahan secara keseluruhan dijadikan dasar analisis prospek pemerintahan; *kedelapan*, laporan unit pemerintah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan keuangan sektor swasta diperiksa oleh auditor independen.

Berbagai persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta juga dapat disebutkan sebagai berikut: *pertama*, kriteria *validitas* dan *reliabilitas* dokumen sumber; *kedua*, pelaporan keuangan lebih ditentukan oleh fungsi akuntabilitas publik; *ketiga*, siklus akuntansi dapat diperbandingkan; *keempat*, standar akuntansi keuangan yang ditetapkan organisasi independen; dan *kelima*, laporan keuangan pemerintahan dan organisasi swasta bisa diakui sebagai dasar hukum.

Persamaan dan perbedaan laporan keuangan pemerintah dan organisasi swasta perlu dipertimbangkan sebagai hal yang wajar. Profesionalisme dan independensi merupakan dua kata yang sangat menentukan kualitas laporan keuangan tersebut.

2.2.7 Kajian Integrasi

A. Muhasabah

Muhasabah berasal dari kata *hasibah* yang artinya menghisab atau menghitung. Muhasabah ini diidentikkan dengan menilai diri sendiri atau mengevaluasi atau introspeksi diri. Maka, dalam melakukan muhasabah seorang muslim menilai dirinya, apakah dirinya

lebih banyak berbuat baik ataukah lebih banyak berbuat kesalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai seorang muslim, kita harus objektif dalam melakukan penilaiannya dengan menggunakan Al Qur'an dan Sunnah sebagai dasar penilaiannya bukan berdasarkan keinginan diri sendiri. Begitu pula dengan mengevaluasi sistem pengendalian intern yang terdapat di RS juga harus objektif dalam menilainya dan menggunakan dasar yang kuat, seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab:

“Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah (bersiaplah) kalian untuk akhirat (yaumul hisab).”

(<http://www.hilman.web.id/posting/blog/1052/pengertian-makna-dan-hakikat-muhasabah.html>)

Seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab diatas jika dikaitkan dengan pengendalian intern, maka setiap perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang yaitu jika dalam rumah sakit auditor internal. Sehingga sebelum dievaluasi oleh auditor eksternal atau BPK, sebaiknya perlu dievaluasi dan diperbaiki terlebih dahulu dari dalam yaitu auditor internal.

B. Kejujuran dalam Pengelolaan Kas

Dalam hadits telah dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memiliki sifat jujur. Salah satu sifat atau moral seorang manusia yang

paling utama adalah sifat jujur, karena jujur merupakan suatu dasar kebahagiaan masyarakat. Kejujuran ini menyangkut banyak hal terutama dalam segala urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak.

Begitu juga dalam hal mengeluarkan kas. Kas memiliki sifat yang sangat rawan karena mudah sekali dipindahtangankan tanpa adanya bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu, ketika kita dalam mengeluarkan kas hendaknya digunakan dengan sebaik mungkin dan seefisien mungkin serta dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti-bukti tertulis tanpa direkayasa. Hal ini dapat dilihat dari hadist Bukhari yang mengatakan:

“ Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur (shidiq).

Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan, akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong (kadzdzab).” (H.R Bukhari)

Selain itu, didalam al-qur'an juga dijelaskan agar kita memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apa yang kita kerjakan supaya

tidak menimpakan suatu musibah terhadap orang lain. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Hujarat ayat 6, sbb:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا

قَوْمًا بَجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujarat:6)

Ketika kita memiliki jabatan, hendaknya kita dapat menjaga dan mempertanggungjawabkan jabatan yang selama ini kita pegang. Amanah dalam memegang jabatan dengan tidak melakukan kecurangan, akan mendatangkan banyak kepercayaan dari orang sekitar untuk tetap memegang jabatan tersebut. Namun, tidak hanya dapat tanggung jawab saja melainkan kita juga harus jujur dan berpengetahuan luas. Seperti kisah nabi yusuf yang dijelaskan dalam al-qur’an surat yusuf ayat 55 sbb:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

“Berkata Yusuf: 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.' (QS. Yusuf:55)

C. Urgensi Pengendalian Internal

Telah dijelaskan urgensi pengendalian internal yang berkaitan dengan menjaga harta, menjaga hak, dan menghindari konflik dalam surat Al Baqarah (2:282) yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. “(QS. Al Baqarah:282)

Pencatatan merupakan salah satu cara yang dapat dijadikan sebagai alat pengendalian internal. Pencatatan dianggap cara terpenting sebagai bukti kepemilikan, hingga diantara pakar hukum islam berpendapat wajibnya pencatatan dalam transaksi untuk muamalah. Sebagaimana disebutkan oleh Syarakhsi (30/168) adalah untuk menjaga kepemilikan harta dan asset pihak-pihak yang melakukan transaksi, menghindari konflik, gugatan, dan perselisihan, mengantisipasi

keraguan yang kadang terjadi dalam suatu perjanjian, serta guna menghindari akad-akad yang keliru dan rusak.

Dengan adanya pencatatan yang benar dan tanpa rekayasa, semua transaksi yang terjadi akan sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dihadapan Allah SWT serta orang yang melakukan transaksi. Selain itu, pencatatan ini dilakukan guna menjaga harta serta menghindari konflik saat kedua belah pihak melakukan transaksi karena pencatatan ini merupakan bukti yang paling kuat sebagai alat pengendalian.

D. Landasan Beretika

Sebaik-baik manusia dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu harus memiliki kode etik yang menunjukkan bahwa kita memiliki suri tauladan yang baik seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab: 21)

Nabi Muhammad memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh karena itu, hendaklah kita mempelajari sifat-sifat nabi seperti Shiddiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh yang dijelaskan sebagai berikut:

Shiddiq

Shiddiq artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar. Beda sekali dengan pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya. Mustahil Nabi itu bersifat pembohong/kizzib, dusta, dan sebagainya.

إِنَّهُ هُوَ الْوَعْدَىٰ وَيُوحَىٰ ۖ وَعَمَّهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٤﴾

4. *ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*

5. *yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. (QS. An Najm:4-5)*

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa kita harus memiliki sifat shiddiq karena dalam melakukan pengendalian internal terhadap pengeluaran kas ini perlu adanya kebenaran baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan seperti halnya pencatatan dalam suatu transaksi. Dengan adanya kebenaran, semua akan menjadi jelas dan sah sebagai bukti yang kuat dalam bertransaksi.

Amanah

Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika suatu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekkah dengan gelar “Al Amin” yang artinya terpercaya jauh sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Apapun yang beliau ucapkan, penduduk Mekkah mempercayainya karena beliau bukanlah orang yang pembohong.

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ أَمِينٌ نَاصِحٌ

“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu”. (QS. Al A’raaf:68)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita harus bisa dapat dipercaya jika disertai suatu urusan. Suatu pengendalian akan menjadi baik jika semua urusan berada ditangan orang-orang yang dapat dipercaya. Dalam artian, perusahaan memiliki nilai yang baik ketika semua urusan dapat dikerjakan oleh orang-orang yang dapat dipercaya karena hal itu sangat mempengaruhi suatu pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Fathonah

Fathonah artinya cerdas. Mustahil Nabi itu bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan 6.236 ayat Al qur’an kemudian menjelaskan

dalam puluhan ribu hadits membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk ke dalam islam. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara sebaik-baiknya. Apalagi Nabi mampu mengatur umatnya sehingga bangsa Arab yang bodoh dan terpecah-belah serta saling perang antar suku menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan dalam satu Negara yang besar yang dalam 100 tahun melebihi luas Eropa. Itu semua membutuhkan kecerdasan yang luar biasa.

Memiliki kecerdasan adalah suatu hal yang begitu luar biasa karena dalam menyelesaikan suatu urusan perlu berfikir bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dengan tidak memberatkan salah satu pihak. Begitu juga dalam pengendalian internal, seorang karyawan yang memiliki kecerdasan akan sangat membantu dalam menjelaskan segala sesuatunya terkait yang ada dalam perusahaan tersebut.

Tabligh

Tabligh artinya menyampaikan. Segala firman Allah SWT yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi.

لِّيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ

شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

28. supaya Dia mengetahui, bahwa Sesungguhnya Rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. (QS. Al Jin:28)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dalam menyampaikan suatu hal dalam perusahaan harus secara benar dan sesuai dengan kenyataan. Hal itu harus dilakukan sebagai alat pengendalian internal karena jika dalam penyampaian saja tidak tepat maka akan merusak semua hal yang berkaitan dalam perusahaan.

Dari penjelasan empat sifat nabi diatas, hendaknya kita mencontoh sebagai landasan etika dalam melakukan sesuatu hal. Khususnya dalam suatu organisasi untuk menghasilkan informasi, menyampaikan pendapat, serta apa yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan transparansi tanpa ada yang ditutup-tutupi.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

